KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN TRANSNASIONAL IKHWANUL MUSLIMIN TAHUN 2017-2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *COUNTER TERRORISM*

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

ABI QUHAFAH

18323146

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN TRANSNASIONAL IKHWANUL MUSLIMIN TAHUN 2017-2020 DITINJAU DARI PERSPEKTIF *COUNTER TERRORISM*

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

ABI QUHAFAH

18323146

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Kebijakan Arab Saudi terhadap Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin Tahun 2017-2020 Ditinjau dari Perspektif *Counter Terrorism*

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

22 Desember 2022

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Willi Ashadi, S.H.I., M.A.	
2	Hasbi Aswar, S.IP., M.A., Ph.D.	
3	Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

22 Desember 2022,



Abi Quhafah

DAFTAR ISI

SKRIPSI i

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR SINGKATAN ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 5

1.4 Cakupan Penelitian 5

1.5 Tinjauan Pustaka 6

1.7 Argumen Sementara 13

1.8 Metode Penelitian 14

1.8.1 Jenis Penelitian 14

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian 14

1.8.3 Metode Pengumpulan Data 14

1.8.4 Proses Penelitian 15

1.9 Sistematika Pembahasan 15

BAB II DINAMIKA ARAB SAUDI DAN PERKEMBANGAN 17

2.1 Terorisme di Arab Saudi 17

2.2 Hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin 23

2.3 Langkah Arab Saudi Membendung Gerakan Transnasional 27

BAB III ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN TRANSNASIONAL IKHWANUL MUSLIMIN MELALUI TEORI *COUNTER-TERRORISM* 30

3.1 Upaya Pemerintah Arab Saudi dalam Mengatasi Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin melalui Pendekatan *Tactical Counter-terrorism* 30

3.2 Upaya Pemerintah Arab Saudi dalam Mengatasi Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin melalui Pendekatan *Strategic Counter-terrorism* 36

3.2.1 Perang Pemikiran 36

3.2.2 Pencegahan Pendanaan Teror 37

3.2.3 Kerjasama Internasional 39

BAB IV PENUTUP 41

4.1 Kesimpulan 41

4.2 Rekomendasi 42

DAFTAR PUSTAKA 43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gulf Cooperation Council 1
Gambar 2. Bendera IM dan Arab Saudi 23

DAFTAR TABEL

Table 1. Klaim Negara terhadap Ikhwanul Muslimin …… 21

DAFTAR SINGKATAN

GCC	: *Gulf Cooperation Council*
ISIS	: *Islamic State of Iraq and Syria*
IM	: Ikhwanul Muslimin
AQ	: Al-Qaeda
LJ	: Laskar Jihad
LPI	: Laskar Pembela Islam
FPI	: Front Pembela Islam
FKAWJ	: Forum Komunikasi Ahlussunnah Wal Jamaah
SDA	: Sumber Daya Alam
UIM	: Universitas Islam Madinah
UU	: Undang-Undang
PSS	: *The Presidency of State Security*
IEDs	: *Improvised Explosive Devices*
UAS	: *Unmanned Aircraft Systems*
TFTC	: *Terrorist Financial Targeting Center*
UN	: *United Nations*
FATF	*: Financial Action Task Force*

ABSTRAK

Negara Arab Saudi merupakan negara yang memiliki banyak keunggulan terutama di kawasan Timur Tengah. Sehingga sesuatu yang potensial apabila Arab Saudi dikategorikan sebagai aktor utama di Timur Tengah. Pada 5 Juni 2017, Arab Saudi beserta negara teluk bekerjasama untuk memblokade Qatar, yang dituduh memiliki hubungan dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin (IM). Padahal jika ditinjau kembali, negara Arab Saudi pernah memiliki kedekatan dan menjadi payung teduh kelompok Ikhwanul Muslimin terutama pada masa King Abdul Aziz dan King As-Syahid Malik Faishal. Namun, kedekatan IM dan Arab Saudi kandas ketika pasca perang teluk dan diperburuk ketika terjadi 9/11. Selanjutnya, terjadi Arab Spring yang mana ditandai dengan keberhasilan meruntuhkan pemerintahan diktator negara-negara Teluk, menjadikan hubungan Arab Saudi dan IM makin memburuk dan Arab Saudi menganggap IM sebagai kelompok teroris. Oleh karena itu, terdapat beberapa kebijakan Arab Saudi untuk menangani counter-terrorism Ikhwanul Muslimin. Melalui dua pendekatan utama yang dklasifikasikan oleh David Cortright dan George A. Lopez (2007) yakni Tactical Counter-Terrorism (berbasis militer) dan Strategic Counter-Terrorism (non-militer).

Kata Kunci : *Counter-terrorism, Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin.*

ABSTRACT

Saudi Arabia is a country that has many advantages, especially in the Middle East region. So, it is possible if Saudi Arabia is included as the main actor in the Middle East. On June 5, 2017, Saudi Arabia and the Gulf countries worked together to blockade Qatar, which was accused of having links with the Muslim Brotherhood (IM) terrorist group. In fact, if we look back, Saudi Arabia once had close ties and became the umbrella for the Ikhwanul Muslimin group, especially during the reign of King Abdul Aziz and King As-Syahid Malik Faishal. However, the proximity of IM and Saudi Arabia ran aground after the Gulf war and was exacerbated when 9/11 occurred. Furthermore, the Arab Spring occurred which was marked by the success of overthrowing the dictatorial governments of the Gulf countries, making relations between Saudi Arabia and the IM worse and considering the IM of Saudi Arabia as a terrorist group. Therefore, there are several policies of Saudi Arabia to deal with the counter-terrorism of the Muslim Brotherhood. Through two main approaches classified by David Cortright and George A. Lopez (2007), namely Tactical Counter-Terrorism (military based) and Strategic Counter-Terrorism (non-military).

Keywords: *Counter-terrorism, Saudi Arabia, Muslim Brotherhood.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arab Saudi merupakan negara yang berada di Timur Tengah dan merupakan salah satu anggota *GCC* (*Gulf Cooperation Council)* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Dewan Kerjasama Teluk yang paling signifikan. Selain Arab Saudi, negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan GCC meliputi negara Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Gambar 1. Gulf Cooperation Council



(Sumber: Britannica)

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi berbentuk monarki absolut, yang resmi berdiri pada tanggal 23 September 1932. Di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh Raja dan untuk saat ini negara Arab Saudi dipimpin oleh Raja yang bernama “Salman bin Abdulaziz Al-Saud”. Pada sistem pemerintahnnya negara Arab Saudi menjadikan al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai asas konstitusi

negaranya. Oleh karena itu, dengan konstitusi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam memberikan ruang terhadap ulama-ulama Arab (bermanhaj Wahabi) untuk turut serta mengatur sistem konstitusionalnya. Karena latar belakang sejarah Arab Saudi yang tidak dapat dipisahkan dengan Wahabisme baik dari segi pendirian negara maupun dari segi pemerintahannya (Izaqi 2016).

Ajaran Wahabi dideklarasikan sebagai ideologi negara Arab Saudi pada tahun 1932 yang mana bertepatan dengan deklarasi pendirian negara tersebut (Wafi 2018). Ajaran wahabi di negara Arab Saudi awal mulanya dicetus pada sekitar abad 18 masehi oleh Muhammad Abd al-Wahab. Berkat kedekatan Muhammad Abd al-Wahab dengan seorang raja Suud yang bernama Muhammad ibn Saud memberikan kemudahan untuk menjalin kerjasama dengan Muhammad Abd al-Wahab untuk menyebar luaskan paham wahabi tersebut. Oleh karena itu, paham wahabi di negara Arab Saudi terbilang cukup pesat. Manhaj Wahabi dalam pemikirannya menolak segala bentuk ‘amaliyah baik yang berbau khurafat (semua cerita yang ada rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran, pantang-larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam), bid’ah (Mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah), dan sufistik (Pengobatan untuk menyucikan jiwa melalui pendekatan islami (dzikir, pendekatan bertaubat, bimbingan). Karena mereka berpendapat bahwa pelaksanaan ‘amaliah tersebut bertentangan dengan yang diajarkan dalam syariat Islam (el-Fadl 2006).

Tahun-tahun awal berdirinya Arab Saudi juga merupakan awal-awal dari berdirinya sebuah organisasi dakwah yang sangat berpengaruh di Timur Tengah, yakni *The Muslim Brotherhood* atau yang kerap dikenal dengan Ikhwanul

Muslimin. Sebuah organisasi Islamis transnasional bergenre modernis yang dibentuk oleh Hasan al-Banna di Mesir pada tahun 1928. Adapun sejarah hubungan antara Ikhwanul Muslimin dan negara-negara Timur Tengah berawal ketika berbagai ideologi memiliki perang penting di Timur Tengah. Sehingga hal tersebut dianggap oleh negara-negara Timur Tengah sebagai ancaman bersama sekaligus sebagai faktor pemersatu. Akan tetapi, ketika negara-negara monarki yang digulingkan seperti Iraq, Yaman, dan Libya menyadari bahwa ancaman ideologi itu benar adanya. Oleh karena itu, pada tahun 1960-an saat itu negara Mesir dikepalai oleh Gamal Abdel Nasser Ikhwanul Muslimin mendapatkan perlakuan yang tidak baik yakni berupa penindasan sehingga membuat sebagian tokohnya melarikan diri ke negara-negara teluk termasuk Arab Saudi untuk mencari perlindungan dengan cara menjadi pengajar di perguruan-perguruan tinggi (Aksa 2017).

Gerakan yang dilakukan Ikhwanul Muslimin dalam menyebarkan pahamnya yakni dengan mengisi sektor pendidikan Arab Saudi baik dalam penulisan serta pengajaran di sekolah-sekolah tinggi (Hardoko 2018). Namun, dengan seiring berjalannya waktu para ulama Arab Saudi yang identitas kebanyakan beraliran wahabi sadar akan ancaman Ikhwanul Muslimin dan menganggap bahwa pemikiran Ikhwanul Muslimin bertentangan dengan alirannya (wahabi). Di mana, menurut paham Wahabi, Ikhwanul Muslimin ini terkesan *westernest* dan bisa dikatakan bahwa pemikiran yang disampaikan oleh pengajar (tokoh Ikhwanul Muslimin) ini berbahaya bagi identitas Arab Saudi baik dalam segi ideologi maupun sistem pemerintahan di masa yang akan datang. Sehingga pada awal abad ke-21 maraknya kampanye anti Ikhwanul Muslimin (Dacreama 2013).

Sampai pada akhirnya organisasi Ikhwanul Muslimin dilabeli oleh Arab Saudi sebagai kelompok terrorism pada tahun 2014 (BBC News 2014).

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dalam pertemuannya bersama sebuah komite yang bertugas untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan kelompok-kelompok ekstrimis mendapatkan bahwa terdapat beberapa organisasi yang dilabeli sebagai kelompok terorisme oleh Arab Saudi yakni organisasi Al-Qaeda, kelompok Hizbullah, dan kelompok Ikhwanul Muslimin. Sehingga pemerintah Arab Saudi membuat kebijakan bahwa setiap warga negara Arab Saudi yang ikut berperang baik dalam negeri maupun diluar negeri dengan tujuan untuk mendukung kegiatan terorisme maka akan mendapatkan hukuman. Karena dewasa ini, negara Arab Saudi menganggap kegiatan tindak terorisme ini mengancam ideologi yang telah disepakati oleh pemimpin-pemimpin terdahulunya yakni ideologi wahabi (BBC News 2014).

Maka dari itu melihat dinamika perpolitikan Arab Saudi yang berlawanan dengan Ikhwanul Muslimin dalam upaya pertahanan ideologi internal dan juga untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan negara Arab Saudi, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana kebijakan yang digunakan Arab Saudi dalam mengatasi gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin ditinjau dari perspektif *Counter Terrorism* terutama pada tahun 2017-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan Arab Saudi terhadap gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin tahun 2017-2020 ditinjau dari perspektif *counter-terrorism*?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Arab Saudi terhadap gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin tahun 2017-2020 dalam perspektif *counter terrorism*.

1.4 Cakupan Penelitian

Kebijakan Arab Saudi terhadap gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin pada tahun 2017-2020 adalah dengan meratifikasi kembali Undang-Undang (UU) Counter-Terrorism pada tahun 2017. Sebelumnya UU tersebut telah disetujui pada Desember 2013 oleh Raja Arab Saudi dan berlaku pada 1 Februari 2014. Ratifikasi ini telah memperluas cakupan terhadap definisi teroris dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak teroris. Kemudian, tanggal 5 Juni 2017 Arab Saudi beserta negara teluk lainnya resmi memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena Qatar dituding bekerja sama dengan Ikhwanul Muslimin yang mana dianggap berkomplot dengan kelompok terrorism. Selain itu, pada tahun 2018 Arab Saudi mulai membersihkan ideologi yang pernah disebar oleh Ikhwanul Muslimin dengan cara menghentikan pengajar yang bersimpati di organisasi tersebut dan mengganti kurikulum pendidikannya (Hardoko 2018). Pada tahun 2019 Ikhwanul Muslimin dianggap sebagai kelompok yang membahayakan Arab Saudi yang didukung oleh fenomena pada tahun 2020, dimana terdapat 300 orang lebih yang ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas lebih dalam lagi bagaimana pengaruh yang dilakukan Ikhwanul Muslimin terhadap nasional Arab Saudi dan juga bagaimana Arab Saudi membendung gerakan Ikhwanul Muslimin yang

dianggap telah menyebarkan paham yang bertentangan dengan ideologi Arab Saudi yakni wahabi dari tahun 2017-2020.

1.5 Tinjauan Pustaka

Beberapa dari literatur yang relevan dengan penelitian ini, khususnya Strategi Arab Saudi dalam membendung gerakan transnasional ikhwanul muslimin ditinjau dari perspektif *counter-terorisme*, peneliti peneliti belum pernah menemukan penelitian yang mengkaji judul tersebut. Namun, berdasarkan penelusuran peneliti melalui melalui studi kepustakaan, ada beberapa peneliti yang mengangkat tema mengenai strategi arab saudi dalam menanggulangi kasus terorisme sebagai objek penelitian berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Gamal M. Selim (2015) berjudul "Egypt under SCAF and The Muslim Brotherhood: The triangle of counter-revolution" membahas terkait revolusi Mesir yang dibajak oleh aliansi struktural, Ikhwanul Muslimin, Amerika Serikat yang muncul sebagai segitiga kontra-revolusi pasca Hosni Mubarak yang mana Aktor-aktor tersebut menekan untuk perubahan dengan menggunakan sistem demokratis. Dalam hal ini Gamal M. Selim (2015) lebih berfokus kepada perubahan sistem pemerintahan yang diakibatkan *arab spring.* Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk memperluas dampak dari arab spring terutama di negara Arab Saudi namun dengan perspektif kontra-terrorisme.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Cynthia Lum (2006) berjudul "*Are counter-terrorism strategies effective? The resutls of the Campbell systematic revies on counter-terrorism evaluation research*" bahwa terdapat jenis-jenis penanggulangan terorisme, salah satunya yakni dengan penggunaan resolusi PBB melawan

terorisme. Walaupun resolusi tersebut bersifat umum, dengan memiliki tujuan untuk memberikan efek jera terhadap terorisme yakni dengan menerapkan norma-norma internasional yang kemudian dapat emperkuat kebijakan nasional melawan terorisme atau meminimalisir tindak teroris. Namun pada faktanya, resolusi yang dimaksudkan yakni untuk mencegah dan menghukum kejahatan terorisme terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional sepertinya tidak memiliki tingkat efektif yang terlihat secara statistik. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas terkait tingkat keefektifan atau kebijakan Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin yang dianggap teroris dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah Arab Saudi dalam mengatasi teroris secara efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayasrah (2009) yang berjudul *Jordan Stands at The Front Line of Combating Terrorism*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anwar Ayasrah ini membahas lebih dalam terkait kebijakan negara Yordania dalam menanggulangi tindak terorisme pasca terjadinya peristiwa pada tanggal 11 September 2001 di negara Amerika Serikat. Yordania telah mengalami berbagai tindak terorisme sejak 1960, ditambah pula angkanya semakin bertambah ketika munculnya organisasi Al-Qaeda. Adapun target dari serangan teroris di negara Yordania yakni pada masyarakat setempat, institusi internal, diplomat serta kepentingan luar negeri. Jika melihat secara eksplisit dalam penelitian ini membahas negara Yordania secara jangka waktu yang panjang, serta memiliki fokus terhadap korban dari tindak terorisme tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan memberikan pandangan secara berbeda yakni dengan fokus terhadap strategi negara dalam menghadapi tindak kejahatan terorisme tersebut, terutama

kebijakan negara Arab Saudi. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Blanchard & Humud (2018) berjudul *The Islamic State and United State Policy* ditinjau dari perspektif *counter terrorism*. Penelitian tersebut membahas terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi ISIS. Pada saat itu ISIS dianggap memberikan ancaman terhadap Amerika Serikat karena telah berhasil menguasai sebagian dari wilayah Irak dan Suriah. Hal tersebut terjadi karena organisasi ISIS bukanlah merupakan jenis terorisme domestik, melainkan sudah masuk dalam kategori terorisme transnasional. Karena target ISIS yang tidak hanya berfokus pada penyerangan dalam satu negara, akan tetapi juga terhadap negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, ISIS menjadi permasalahan dalam dunia internasional. Ditambah lagi para pemimpin ISIS yang selalu mendesak untuk menyerang Amerika Serikat beserta koalisinya. Jika dilihat dalam penelitian tersebut bahwa memiliki subjek yakni negara sebagai aktor utama. Pada hal ini negara Amerika Serikat dan objeknya yakni ISIS yang meresahkan dunia internasional terutama pada negara Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga, jika dilihat dari perbedaan bahwa penulis memiliki pandangan berbeda dengan penelitian ini yakni dengan fokus terhadap strategi negara Arab Saudi dan tentu pembaca akan melihat bagaimana perbedaan setiap negara dalam melakukan terhadap kejahatan tindak terorisme. Oleh karena itu, penulis berencana untuk memberikan pandangan berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Mamdud (2018) dalam Jurnal ICMES Volume 2 No 1, mengangkat judul Genealogi Gerakan Ikhwan Al Muslimin dan Al Qaeda di Timur Tengah. Tujuan artikel ini untuk mengkaji akar gerakan organisasi Ikhwan Al Muslimin dan Al Qaeda, serta bagaimana relasi kuasa dan pengetahuan yang terjadi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah genealogi yang berupaya mengkaji aspek sejarah dan hubungannya dengan formulasi kuasa dan politik, serta teori islamisme, yaitu mengurai aspek ideologi Islam, gerakan politik Islam, serta aspek-aspek sosial-ekonominya. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa munculnya terorisme yang dilakukan kelompok-kelompok Islam radikal di Timur berakar pada semangat perlawanan terhadap kolonialisme Barat pada awal ke -19. Ada dua gerakan yang memiliki pengaruh besar dan menginspirasi kemunculan gerakan-gerakan serupa di Timur Tengah, yaitu Ikhwan Al Muslimin (IM) dan Al Qaeda (AQ). Gerakan IM dan AQ merupakan gerakan perlawanan terhadap Barat. Pemikiran Sayyid Quthb menjadi inspirasi awal dari radikalisme IM, sehingga mereka membangun milisi yang lebih ekstrim seperti Jihad dan Al Qaeda. IM yang mulanya merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan akhirnya melibatkan diri dalam politik praktis. Namun dalam artikel tersebut belum membahas terkait bagaimana strategi yang dilakukan Arab Saudi dalam membendung kejahatan transnasionalisme Ikhwanul Muslimin. Maka dari itu penulis berupaya memberikan informasi yang fokus terhadap strategi Arab Saudi dalam membendung kejahatan Ikhwanul Muslimin dengan melihat dari kacamata *counter terrorism.* Metode gerakan Islam yang berbasis pendekatan budaya menjadikan IM diterima luas oleh masyarakat Mesir, sehingga pernah berhasil menang dalam pemilu dan berada dalam lingkungan elit kekuasaan. Sebaliknya AQ melakukan gerakan perlawanan

terhadap Barat sekaligus pemerintah di negara-negara Muslim yang dinilai anti-Islam dengan metode teror, sehingga selalu marjinal dalam opini publik masyarakat Muslim. Namun dalam tulisan ini hanya membahas dalam pandangan genealogi, bukan dari pandangan teori *counter terrorism.* Sehingga penulis akan mencoba meneliti lebih dalam terkait pengaruh organisasi Ikhwanul Muslimin terhadap negara Arab Saudi tepatnya pada tahun 2017-2020 ditinjau dari pandangan *counter terrorism.*

Dalam tulisan Noorhaidi Hasan yang berjudul Laskar Jihad (2008), mengulas tentang Laskar Jihad (LJ), Laskar Pembela Islam (LPI), organisasi paramiliter dari Front Pembela Islam (FPI) dibawah Habib Rizieq Shihab yang sering dikaitkan dengan organisasi teroris, penulis menekankan bahwa tujuan dari berdirinya organisasi tersebut untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, namun itulah perbedaannya dengan jejaring teroris. Organisasi tersebut ingin syariat Islam dilaksanakan tanpa melalui jalur politik-konstitusional atau jalur politik-revolusioner (makar). Laskar Jihad muncul sebagai organisasi paramiliter yang menyatukan para pemuda beraliran Salafi. Organisasi yang menaungi LJ adalah Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wa Jamaah (FKAWJ) yang telah berdiri semenjak tahun 2000. Pendiri Laskar Jihad ini adalah Ja'far Umar Thalib bersama beberapa tokoh Salafi lainnya. Hasan juga menjelaskan bahwa Ja'far adalah keturunan Hadrami yang lekat dengan organisasi seperti Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis). Ia pun pernah belajar di Pakistan, dan ikut bertempur di medan Afganistan pada tahun 1980an. Menariknya, dalam buku ini Hasan tidak hanya menjelaskan dari sisi negatif LJ, Ia pun menjelaskan hal-hal positif yang dilakukan LJ seperti mendirikan Taman Kanak-kanak Islam, Sekolah Islam, kursus baca

Qur'an terpadu. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan menandakan bahwa LJ bukanlah kelompok teroris. Hasan mengidentifikasikan kemunculan Laskar Jihad semenjak tahun 1980-an dengan munculnya para pemuda yang berpakaian jubah panjang, bersorban, memakai celana ¾ dan memiliki janggut panjang. Gerakan semacam ini menekankan pada pemurnian aqidah umat Islam tanpa menekankan sebuah perubahan politis dan mendirikan negara Islam.

Adapun perbedaan yang diambil sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya yakni penelitian kali ini akan lebih fokus terhadap gerakan kejahatan transnasional Ikhwanul Muslimin, perkembangan Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi serta mengetahui bagaimana strategi Arab Saudi dalam menanggulanginya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran yang digunakan untuk melihat kebijakan Arab Saudi dalam membendung gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin adalah teori *counter terrorism*. Terdapat beberapa pendekatan Teori *counter terrorism,* adapun sebagai pembanding yakni teori dari Todd Sandler dan Walter Enders pada bukunya berjudul *The Political Economy of Terrorism* mendefinisikan yakni sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tujuannya untuk menghambat serangan serta mengurangi konsekuensi terorisme (*defensive*) atau malah menyerang (*offensive*) (Sandler 2005).

Defensive merupakan sebuah tindakan untuk melindungi target potensial dengan cara membuat serangan yang lebih besar sehingga dalam melakukannya butuh biaya yang cukup banyak agar mengurangi kemungkinan keberhasilan aksi

terorisme. Sedangkan *offensive* Artinya dalam tindakan ini pemerintah harus turun tangan untuk menghadapi kelompok terorisme. Kelebihan dari tindakan *offensive* ini lebih pada tindakan langsung sehingga dapat menghancurkan sumber dari terorisme itu sendiri, menghilangkan pahamnya, atau menangkap dan membunuh anggota kelompok terorisme. Namun pada teori yang dijelaskan Todd Sandler dan Walter Enders terkesan lebih dominan terhadap kekuatan militer baik untuk menyerang (*offensive*) atau sekedar menghambat serangan (*defensive*). Oleh karena itu, teori dari Todd Sandler dinilai kurang relevan pada studi kasus ini yang lebih bersifat *soft approach.*

Pada hal ini penulis berpihak terhadap teori counter-terrorisme dalam pandangan David Cortright dan George Lopez yang membaginya menjadi dua pendekatan utama dalam memerangi terorisme. Adapun yang pertama yakni *tactical counter-terrorism,* berfokus kekuatan militer dengan cara memburu, menangkap, hingga membunuh para aksi terorisme serta menghancurkan kamp kelompok teroris dan memusnahkan sumber daya manusianya. Kedua yakni *strategic counter-terrorism* yang bersifat non-militer. Termasuk respon kebijakan dan keputusan yang dirancang dan disusun untuk menghilangkan kondisi yang bertahan dan mendasar dalam menyuburkan ideologi terorisme dan radikal. Karena ancaman teroris merupakan bersifat global, oleh karea ini pendekatan kooperatif non-militer juga perlu dan merupakan elemen penting dalam strategi kontra-terorisme dan prakarsa anti-terorisme.

1.7 Argumen Sementara

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang bergenre dakwah lintas negara. Adapun dakwah yang dilakukan Ikhwanul Muslimin berupa pengajaran di berbagai macam perguruan tinggi, terutama di Arab Saudi. Namun, dengan berjalannya waktu paham Ikhwanul Muslimin ini makin terlihat jelas bahwa apa yang diajarkan bertentangan dengan paham yang dianut oleh mayoritas masyarakat Arab Saudi. Sehingga akan memberikan dampak atau pengaruh terhadap masyarakat Arab Saudi. Semenjak itulah Ikhwanul Muslimin dianggap berbahaya terhadap identitas Arab Saudi baik dalam segi ideologi maupun dalam sistem pemerintahan.

Adapun skripsi sebagai pembanding yang berjudul *"Alasan kebijakan Arab Saudi melakukan blokade terhadap Qatar"*. Di mana alasan pemutusan hubungan tersebut tidak lain karena negara Qatar yang bersedia menjalin kerjasama terhadap Ikhwanul Muslimin (Octaviarie, 2019). Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan penulis fokus terhadap pengaruh Ikhwanul muslimin terhadap Arab Saudi. Di mana Arab Saudi memandang Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok *terrorism.*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengertian teori *counter-terrorism* menurut David Cortright dan George Lopez dalam mengkaji strategi Arab Saudi dalam membendung gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin. Di mana Arab Saudi telah memberikan label terhadap kelompok Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok terorisme. Sehingga dirasa relevan apabila dijelaskan berkaitan dengan *counter-terrorism.* Penulis menduga, Arab Saudi melibatkan dua

pendekatan baik secara *tactical counter-terrorism* dan *strategic counter-terrorism* dalam melawan gerakan Ikhwanul Muslimin, yang lebih lanjut akan dijelaskan dalam skripsi ini.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada skripsi yang berjudul "Kebijakan Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin" ini mengambil jenis penulisan yang bersifat metodologi penelitian kualitatif. Penelitian bersifat kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa kata-kata yang tertuang dalam sebuah tulisan atau dari lisan orang-orang yang dapat diamati (Moleong 2007). Alasan penulis mengambil penelitian kualitatif yakni melihat dari latar belakang penulis yang fokus dalam bidang hubungan internasional sehingga dirasa sangat relevan dan akan mendapatkan hasil maksimal apabila dilakukan sesuai bidang yang ditekuni.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini yaitu negara sebagai aktor utama. Pada penelitian ini yaitu negara Arab Saudi dan sebagai objek dari permasalahan tersebut adalah organisasi Ikhwanul Muslimin.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni bersifat sekunder, di mana penulis akan menganalisis dari berbagai literatur tulisan para pendahulu sebagai pendukung dari tulisan ini. Penulis mengumpulkan

berbagai macam data berupa jurnal, buku, skripsi terdahulu, kabar berita terpercaya, dan lain-lain yang nantinya dapat menyempurnakan penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Data atau dokumen terdahulu akan digunakan sebagai dasar serta pelengkap dalam tulisan ini karena dalam banyak hal data atau dokumen terdahulu merupakan sebagai sumber data terpercaya yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, atau untuk meramalkan (Moleong 2007, 217).

1.9 Sistematika Pembahasan

Demi memudahkan untuk melihat secara keseluruhan dalam pembahasan skripsi ini maka penulis melampirkan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : DINAMIKA ARAB SAUDI DAN PERKEMBANGAN

Pada bab ini penulis menganalisis judul terkait "Kebijakan Arab Saudi terhadap Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin tahun 2017-2020" dilihat dari perspektif *counter terrorism*.

BAB III : ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN TRANSNASIONAL IKHWANUL MUSLIMIN MELALUI TEORI *COUNTER-TERRORISM*

Pada bab ini penulis akan menganalisis kebijakan Arab Saudi terhadap gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin melalui perspektif *counter terrorism.*

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penelitian ini, penulis membagi menjadi dua yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

DINAMIKA ARAB SAUDI DAN PERKEMBANGAN

Dalam penelitian bab 2 ini, penulis akan memberikan gambaran secara eksplorasi mengenai dinamika dan perkembangan Arab Saudi di Timur Tengah. Arab Saudi sebagai negara yang memiliki peranan penting terhadap Timur Tengah. Namun Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang sangat menderita dalam menghadapi terorisme. Oleh karena itu, perlu untuk melihat secara dekat asal-usul terorisme di Arab Saudi dan mengidentifikasi penyebabnya.

2.1 Terorisme di Arab Saudi

Terorisme merupakan fenomena destruktif universal yang saat ini telah mempengaruhi seluruh dunia, terutama negara Arab Saudi. Hal tersebut memberikan pergolakan pada pemerintahan atau kerajaan baik secara lingkungan, ideologi, ekonomi, psikologis yakni dengan cara yang tidak dilakukan oleh perang konvensional. Istilah terorisme sangat identik dengan kehancuran, kerusuhan, kekacauan dan ketakutan yang mana kegiatan terorisme sangat berdampak pada orang yang tidak bersalah dan justru uang paling sering menjadi sasaran teroris. Oleh karena itu, penting untuk melihat secara dekat awal mula terorisme di Arab Saudi dan mengidentifikasi penyebabnya (Doghere 2008).

Perkembangan ekstremisme muslim Al-Qaeda dan Sunni merupakan pendekatan efektif bagi Arab Saudi dalam perang melawan terorisme. Pemahaman mengenai Wahabi merupakan langkah utama dalam mengkategorikan peran Arab Saudi dalam melawan terorisme secara global. Bahkan, Wahabi ditafsirkan sebagai akar dari kekerasan dan teror muslim Sunni. Penafsiran ini juga didukung dengan

peristiwa 11 September, sehingga publik menyebut Wahabi sebagai '*Varian islam yang radikal dan anti terhadap Amerika*'. Hal ini mendorong masyarakat global mengkategorikan Arab Saudi sebagai negara Wahabi dan diperlakukan seperti rezim Taliban di Afghanistan. Wahabi telah menjadi interpretasi Islam di wilayah Arab Saudi sejak berdirinya negara modern pada awal abad ke-20. Perkembangan Wahabi di Arab Saudi dianggap sebagai ideologi negara, bukan suatu revolusioner. Berbagai bentuk serangan terorisme telah terjadi, seperti pengeboman di Riyadh pada Mei dan November 2003. Hal ini memicu gelombang serangan teroris selanjutnya. Setelah pengeboman tersebut, lebih dari 600 orang di Arab Saudi ditangkap. Bahkan, telah terjadi sejumlah baku tembak antara polisi Arab Saudi dan tersangka simpatisan Al-Qaeda. Sehingga menyebabkan puluhan tewas dan dinas keamanan Arab Saudi juga telah menemukan gudang senjata terorisme Doktrin politik revolusioner telah berkembang sejak tahun 1960-an oleh pemikir Ikhwanul Muslimin di Arab Saudi. Hal ini bermula ketika kelompok tersebut memiliki pandangan bahwa, Jihad dilakukan untuk melawan pemerintah Arab Saudi yang dianggap tidak cukup muslim dan bertujuan untuk mengubah politik kawasan, serta melawan Amerika Serikat. Akan tetapi, pada tahun 1994 Osama Bin Laden telah dicabut kewarganegaraannya dan pemerintah Arab Saudi melakukan penangkapan besar-besaran pada tahun 1990-an. Dalam hal ini, Arab Saudi memainkan peran penting dalam mengatasi terorisme di kawasan secara global (Gause II 2021).

Pada tahun 2017, berita Ruters Arab Saudi melaporkan bahwa Ikhwanul Muslimin telah melakukan aktivitas spionase dan berhubungan dengan entitas asing. Di tahun yang sama, Arab Saudi telah menangkap beberapa aktivis, imam, akademisi, presenter, hingga penyair yang dianggap memiliki hubungan dengan

kelompok teroris, serta memiliki pandangan politik islamis yang menentang kerajaan Arab Saudi (BBC News 2014). Bahkan tidak sedikit aksi bom bunuh diri yang terjadi di Arab Saudi sebagai bentuk serangan teroris yang mengancam keamanan negara dan masyarakat Arab Saudi. Banyaknya gerakan teroris yang muncul di Arab Saudi telah mendorong pemerintah negara tersebut untuk melakukan hukuman mati terhadap pidana teroris. Pada tahun 2020, pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi mati terhadap 27 terpidana teroris yang telah melakukan kejahatan transnasional. Berupa pembunuhan terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak bersalah (DetikNews 2021).

Ikhwanul Muslimin sebagai salah satu gerakan terorisme yang dikategorikan telah melakukan kejahatan transnasional, di Arab Saudi. Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi Islam terbesar di Mesir yang didirikan oleh Hassan Al-Banna pada tahun 1928. Dan dikategorikan sebagai gerakan terorisme oleh Amerika Serikat pada tahun 2013. Ketentuan internasional mendefinisikan teroris dalam Artikel 1 Ayat (2) *The League of Nations by Adoption of a Convention for The Prevention and Punishment of Terrorism*, menyatakan bahwa '… *acts of terrorism [as] criminal acts directed against a state and intended or calculated to create a state of terror in the minds of particular persons, or groups of persons or the general public*. Bahkan teroris memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu: (Usman 2014)

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis untuk tujuan tertentu.

3. Korban bukan sebagai tujuan melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan.
4. Target aksi teror dipilih dan bekerja secara rahasia.
5. Pesan aksi cukup jelas meskipun pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras.

Ikhwanul Muslimin dikategorikan sebagai terorisme karena telah melakukan beberapa karakteristik terorisme, seperti serangkaian pengeboman dan pembunuhan di Inggris. Dalam poin ke-2 karakteristik terorisme mengenai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis, Ikhwanul Muslimin telah membunuh Perdana Menteri Mesir, Mahmoud Al-Nuqrashi. Gerakan Ikhwanul Muslimin juga terlibat dalam Kudeta yang gagal terhadap Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin telah mengkategorikan kelompok tersebut sebagai gerakan terorisme (Andriyanto 2019).

Pada tahun 1980, menyusul gelombang pembunuhan yang menargetkan pejabat pemerintah dan pada 16 Juni 1979 terjadi pembantaian 83 kadet militer di Aleppo. Sehingga pemerintah Suriah melarang Ikhwanul Muslimin di negara tersebut dan bergabung kedalam kelompok tersebut dapat dihukum mati.

Pada Undang-Undang (UU) Penetapan Teroris Ikhwanul Muslimin tahun 2015. Beberapa negara telah menyatakan bahwasannya Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, diantaranya:

Table 1: Klaim Negara terhadap Ikhwanul Muslimin

No	Negara	Tahun
1	Suriah	1980
2	Rusia	14 Februari 2003
3	Mesir	2013
4	Arab Saudi	3 Maret 2014
5	Uni Emirat Arab	2014
6	Bahrain	21 Maret 2014

(Sumber: congress.gov)

Justifikasi Arab Saudi menyebutkan bahwa, Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan terorisme dibuktikkan dengan pernyataan Majelis Fatwa dan Majelis Cendekiawan Arab Saudi bahwa, Ikhwanul Muslimin adalah suatu gerakan atau organisasi yang dikategorikan sebagai teroris. Hal ini dikarenakan, Ikhwanul Muslimin mendukung kelompok yang melakukan kekerasan, pembunuhan, dan bersangketa dengan pemerintah, serta menjadi gerakan yang tidak patuh (BBC 2014). Justifikasi ini juga didukung oleh kondisi pada September 2017, seorang imam di Arab Saudi yang bernama Salman Al-Odah dengan pengikut di Twitter sebanyak 14 juta telah ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi beserta dengan Awad Al-Qarni dan 20 pengikut lainnya. Hal ini dikarenakan, para imam melakukan pembangkangan, aktivitas spoinase, dan memiliki hubungan dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin. Berbagai bentuk tindakan dan aksi yang dilakukan, yaitu memprovokasi masyarakat Arab Saudi untuk melawan pemerintah setempat, seruan untuk mendirikan Khalifah dengan mengadopsi ideologi Ikhwanul

Muslimin, menyerukan pemberontakan di internal kerajaan Arab Saudi, bergabung dengan Ikhwanul Muslimin, dan menghasut serta memprovokasi melalui media-media sosial (BBC News 2018).

Salman Al-Odah mendorong perubahan politik melalui pandangan keagamaan yang ekstrim, serta Awad Al-Qarni yang menyerukan untuk bergabung bersama Qatar pada akun Twitternya. Hal ini mendorong pemerintah Arab Saudi pada September 2018 untuk menangkap kedua imam besar tersebut dan melakukan persidangan di Pengadilan Terorisme di Riyadh, serta menetapkan hukuman mati untuk keduanya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mendesak masyarakat Arab Saudi untuk melaporkan setiap ucapan di media sosial yang mempromosikan 'gagasan teroris maupun ekstremis' melalui aplikasi ponsel yang diluncurkan setiap tahun oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan, pemerintah Arab Saudi menyatakan jika Tindakan di media sosial, seperti Twitter 'merugikan reputusi atau status negara Arab Saudi' maka akan dianggap sebagai gerakan teroris (Saputra 2017).

Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah dan mengembangkan kebijakan baru untuk mengalahkan para teroris dan serangan mereka yakni dengan melakukan reformasi di bidang pendidikan, agama, politik Arab Saudi. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan dukungan populer di kalangan warga Arab Saudi. Selain itu juga, pemerintah menggunakan sarana militer. Dengan upaya militer Arab Saudi telah membuahkan hasil yang luar biasa dan memberikan keuntungan nyata dalam keamanan dan keselamatan. Akan tetapi keberhasilan tersebut tidak datang dengan mudah, terdapat peran intelijen dalam *counter-terrrorism* yang

sangat penting. Namun hal tersebut sulit untuk dikoordinasikan ke dalam praktik *counter-terrorism* yang efektif.

2.2 Hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin

Gambar 2. Bendera IM dan Arab Saudi



(Sumber: suaraislam.com)

Hubungan antara Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin dapat dibilang naik turun sedari era Raja Abdulaziz hingga saat ini Raja Salman. Di mana hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin ini terjalin bergantung pada kepentingan pemimpin serta melihat kondisi di kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, negara Arab Saudi tidak selalu memandang kelompok ini sebagai ancaman regional (Aziz 2019).

Tepatnya pada masa King Abdulaziz atau lahirnya kerajaan Saudi modern atas dasar koalisi antara Bani Saud dan Alu As-Syaikh (dzurriyah Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri gerakan wahabi) dan juga didukung oleh tentara kabilah badui Nejd. Hal tersebut dikarenakan sikap mereka yang menolak hal-hal baru yang berbau modern. Sehingga hal tersebut menyadarkan King

Abdulaziz bahwasannya rencana proyek untuk memodernisasi Kerajaan Arab Saudi yang baru seumur jagung menghadapi penolakan atau penentangan dari internal loyalisnya sendiri. Maka dari itu, King Abdulaziz mengimpor banyak ulama serta cendekiawan muslim dari Mesir sebagai jalan untuk membangun Saudi Baru. Selain mengundang mereka, King Abdulaziz juga menjalin hubungan baik dengan tokoh ulama dan cendekiawan Mesir seperti Sayyid M Rasyid Ridha, Sayyid Muhibbuddin Al-Khatib, dan lain-lain. Walaupun tokoh ulama Mesir tersebut bermanhaj Salafi, akan tetapi mereka tidak menolak bentuk modernisasi serta merekalah yang awalnya berjasa mencetak manuskrip kitab para ulama Salafi salah satunya yakni Ibnu Taimiyah (Njong 2021).

Dari penjelasan ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari awal berdirinya atau sebagai "fase pertama" hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin, yang berlangsung selama 32 tahun (tahun 1932- 1964). Kerajaan Arab Saudi yang memang membutuhkan tenaga serta dukungan dari ulama dan cendekiawan reformis untuk bertujuan membangun Saudi baru yang lebih modern, mengingat bahwa Wahabiyah konservatif menolak hal-hal baru yang modern. Oleh karena itu, negara Arab Saudi memberikan Ikhwanul Muslimin sebuah perlindungan karena menghadapi represi keras terutama di Mesir, Suriah, dan negara teluk lainnya. Membuat Ikhwanul Muslimin beradaptasi dan mengakar baik pada masyarakat Arab Saudi. (Lacroix 2014)

Pada fase kedua, merupakan fase hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin yang paling dekat yakni ketika dipimpin oleh Raja As-Syahid Malik Faishal (1964 – 1975). Pada dekade ini, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin dibantu

oleh Raja Faishal karena musibah yang menimpa Ikhwanul Muslimin yakni diusir dari negara Arab seperti Mesir, Irak, Suriah, dan lain-lain yang kemudian Ikhwanul Muslimin diberikan banyak posisi dan berkontribusi kepada negara Arab Saudi. (Njong 2021) Ada pun kerjasama pertama yang dilakukan oleh Raja Faishal yang pada saat itu masih menjadi putra mahkota tahun 1962, bersama Ikhwanul Muslimin mendirikan organisasi Liga Muslim Dunia (*Rabithah 'Alam Islami*). Organisasi tersebut berdiri atas inisiatif dari para tokoh Ikhwanul Muslimin terutama mereka yang tergabung dalam pemimpin batalyon mujahidin Ikhwanul Muslimin di Palestina pada tahun 1948 (Njong 2021).

Raja Faishal yang merupakan sosok yang religius dan visioner melihat manfaat dari eksistensi Ikhwanul Muslimin sehingga diberikan akses dalam reformasi pada bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal tersebut dirancang agar menjadi tandingan Universitas Al-Azhar. Fase ini berlangsung selama pemerintahan Raja Faishal, Raja Khalid, dan paruh permata pemerintahan Raja Fahd hingga perang teluk kedua sekitar tahun 1990-1991 (Njong 2021).

Pada fase ketiga, pasca perang teluk di mana Raja Fahd sebagai pemimpin negara Arab Saudi pada saat itu dikritik oleh beberapa cabang Ikhwanul Muslimin karena telah meminta bantuan kepada negara Amerika Serikat untuk mengirim militernya melawan Saddam Husein yang menyerang Kuwait. Hal tersebut dianggap Ikhwanul Muslimin sebagai penodaan terhadap kesucian Mekkah dan Madinah. Oleh karena itu, negara Arab Saudi takut apabila pernyataan Ikhwanul Muslimin tersebut berimplikasi pada politik domestik dan regional. Sehingga pasca

perang Afghanistan, posisi Ikhwanul Muslimin ditinjau dan dipertimbangkam kembali oleh Arab Saudi (Njong 2021).

Pada 11 September 2001, terjadi serangan di Amerika Serikat sehingga hal tersebut membuat kebijakan untuk menindak tegas organisasi apapun yang terhubung dengan kelompok teroris. Oleh sebab itu, Ikhwanul Muslimin mencecar dan mengkritik Arab Saudi, hal tersebut dilakukan melalui perang media dengan menentang kebijakan kerajaan masa itu. Selanjutnya terjadilah Arab Spring, hal tersebut mengakibatkan pergolakan politik hingga pemberontakan yang ditandai dengan keberhasilan Ikhwanul Muslimin dapat meruntuhkan pemerintahan diktator di Tunisia, Yaman, Libya, Mesir. Sejak saat itu hubungan Ikhwanul Muslimin - Arab Saudi makin memburuk sampai pada tanggal 7 maret 2014. Kemudian Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi memasukan Ikhwanul Muslim dalam daftar *terrorists* (Grabowski 2016).

Pasca revolusi Mesir 2011, Ikhwanul Muslimin menggulingkan kepemimpinan dari Husni Mubarak setelah 30 tahun memimpin. Kelompok Ikhwanul Muslimin diresmikan sebagai gerakan politik yang paling berpengaruh di Mesir. Pada saat itu partai politik dari Ikhwanul Muslimin dengan nama “Partai Kebebasan dan Keadilan” berhasil memenangkan dua referendum sehingga kursi yang didapatkan pun jauh lebih banyak daripada pemilihan parlemen yang terjadi pada 2011-2012.

Dengan revolusi ini memberikan kesempatan kepada Muhammad Mursi yang notabene dari Ikhwanul Muslimin atas terpilihnya menjadi presiden Mesir pada tanggal 30 Juni 2012. Hal tersebut membuat Muhammad Mursi memulai

merancang kebijakan-kebijakan politik dalam kepemimpinannya, baik dalam hal kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Untuk kebijakan dalam negeri Muhammad Mursi menegaskan terkait konsep dan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang demokratis, serta masyarakat sipil yang memiliki kebebasan dan keadilan yang mana hal tersebut didasari dengan isi nilai-nilai Islam. Tujuannya yakni bisa melayani seluruh masyarakat dengan sejajar atau adil tanpa melihat latar belakang seperti keyakinan, suku, ras, bahkan warna kulit. Namun hal tersebut tidak berjalan lama, karena pada tanggal 3 Juli 2013 terjadinya protes massa kepada pemerintahan sehingga pemimpin Mursi pun digulingkan dari kursi kepresidenannya (Ramly and Irenewaty 2015).

2.3 Langkah Arab Saudi Membendung Gerakan Transnasional

Dalam kajian ilmu hubungan internasional bahwa telah dipelajari mengenai bagaimana sebuah negara melakukan upaya untuk melindungi negaranya, terutama dalam sebuah ancaman naik dengan meningkatkan persenjataan, membangun kerjasama dan lain-lain. Hal tersebut membuktikan bahwa keamanan merupakan indikator utama yang harus dimiliki, sehingga dapat tercipta suatu negara dengan sistem politik dan ekonomi yang stabil.

Dalam meningkatkan perlindungan negaranya dari sebuah ancaman, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman dalam pernyataan saat wawancara di stasiun televisi pada tanggal 18 Maret 2018 mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi tengah bergencar untuk memerangi ideologi ekstremis yakni dengan perubahan kurikulum yang mana telah dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin. Selain itu juga, pemerintah Arab Saudi bertindak tegas untuk memberhentikan para

pengajar atau dosen yang memiliki keterkaitan dan simpati terhadap Ikhwanul Muslimin. Bahkan Arab Saudi melarang segala jenis buku dan jurnal yang terkait organisasi tersebut (Hardoko 2018).

Suatu kebijakan Arab Saudi bahwasannya tidak hanya dalam pendidikan saja, akan tetapi segala permasalahan yang menyangkut hubungan dengan Ikhwanul Muslimin akan ditindak tegas dan ditangkap termasuk para ulama Arab Saudi dan juga para imam masjid. Seperti yang terjadi di tahun 2017, Sekitar 20 lebih imam dan intelek termasuk imam terkemuka bernama Salman al-Audah dan Awad al-Qarni ditangkap aparat Arab Saudi. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi Saudi mengumumkan bahwa masyarakat dapat bekerjasama dan melaporkan apa saja kegiatan di *social media* yang berisi terkait gagasan teroris dan ekstrimis. Pada kesempatan lain, jaksa memberitahukan di *twitter* bahwa "menjatuhkan reputasi negara" merupakan sama saja dengan "kejahatan terorisme" (BBC World 2017).

Melihat *power* Ikhwanul Muslimin, dinilai sebagai gerakan politik Islam paling berpengaruh terutama dalam kebangkitan Islam di kawasan Timur Tengah pada abad ke-20, serta menjadikan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan transnasional. Terdapat beberapa hal yang membuat Ikhwanul Muslimin menjadi gerakan transnasional, salah satunya yakni ideologi Ikhwanul Muslimin yang fokus terhadap umat. Sehingga tidak ada batasan *national-state* dan tidak juga bertumpu pada otoritas atau pengaruh manapun. Disisi lain, meleburkan gagasan dan instrumen modern yang bersifat transnasional karena yang diperjuangkan oleh Ikhwanul Muslimin adalah ideologi dasar Islam sehingga tidak terbatas oleh

kedaulatan negara dan dengan Islam mampu menembus lintas negara (transnasional*)* (Aziz 2019).

Terlebih terkait urusan luar negeri, Arab Saudi sebagai negara yang memiliki *power* terutama di Timur Tengah menegaskan bahwasannya tidak segan-segan untuk memblokade atau memutus hubungan diplomatik dengan negara yang memiliki kaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Seperti halnya yang terjadi pada Qatar tanggal 5 Juni 2017, dalam pidato seorang Emir Qatar yang bernama Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani menyatakan dengan terang-terangan mendukung kelompok teroris sehingga memicu kesimpulan bahwasannya negara Qatar mendukung aliansi Ikhwanul Muslimin, ISIS, dan Al-Qaeda. Oleh karena itu, negara-negara pro Arab Saudi juga memutuskan hubungan diplomatik dengan negara Qatar (BBC, Empat negara Arab putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar 2017).

Adapun upaya pengamanan yang dilakukan Arab Saudi tersebut memberikan dampak positif yang begitu besar, baik dalam negeri Arab Saudi hingga kawasan Timur Tengah. Hal tersebut dilakukan oleh negara Arab Saudi bertujuan untuk menjauhkan pengaruh ideologi Ikhwanul Muslimin dan mengamankan dari berbagai ancaman-ancaman yang muncul yang sangat memungkinkan mempengaruhi keadaan negara Arab Saudi.

BAB III

ANALISIS KEBIJAKAN ARAB SAUDI TERHADAP GERAKAN TRANSNASIONAL IKHWANUL MUSLIMIN MELALUI TEORI *COUNTER-TERRORISM*

Negara Arab Saudi merupakan salah satu negara terkemuka yang memerangi terorisme. Pada buku yang ditulis oleh David Cortright dan George A. Lopez (2007) berjudul *Uniting Against Terror: Cooperative Non Military Responses to the Global Terrorist Threat* membahas terkait dua pendekatan utama dalam memerangi terorisme, yaitu *tactical counter-terrorism* dan *strategic counter-terrorism*. Oleh karena itu, dalam bab tiga ini penulis akan menganalisis terkait dua pendekatan tersebut.

3.1 Upaya Pemerintah Arab Saudi dalam Mengatasi Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin melalui Pendekatan *Tactical Counter-terrorism*

Secara undang-undang, Arab Saudi telah memiliki Hukum *Counter-Terrorism* yang telah disetujui oleh Raja pada Desember 2013 dan berlaku pada 1 Februari 2014. Terlebih pada 7 Maret 2014, Kementerian Dalam Negeri memperluas definisi teroris dengan menambahkan daftar yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak teroris. Kemudian, pada 31 Oktober 2017, Dewan Menteri Saudi menukil Undang-Undang (UU) tahun 2014 terkait pemberantasan tindak teroris dan pendanaannya (Alkarama 2017).

Statement Arab Saudi mengenai Ikhwanul Muslimin yang dikategorikan sebagai gerakan teroris telah disampaikan oleh Ikatan Cendekiawan Senior Arab Saudi melalui Media *Middle East Monitor*. Sebelumnya pada tahun 2014,

Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi telah mengambil langkah pada bulan Maret untuk mengkategorikan Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan teroris. Pada Mei 2014, Majelis Ulama Senior dan pemerintah Arab Saudi memasukkan Ikhwanul Muslimin ke dalam daftar hitam sebagai organisasi terori dalam Dekrit Kerajaan bersama dengan tiga kelompok Islam lainnya yang berbasis di Timur Tengah. Keputusan dalam Dekrit Kerajaan itu meliputi pelarangan keanggotaan kelompok dan segala bentuk dukungan/simpati terhadap Ikhwanul Muslimin. Arab Saudi menyebutkan bahwa 'Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok teroris yang tidak mewakili pendekatan Islam. Bahkan, Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi yang tidak menaati penguasa yang sah dan memicu perselisihan yang berkedok agama, serta memperaktikkan kekerasan serta tindakan terorisme'. Hal ini juga didikung oleh pernyataan Arab Saudi dari Dewan Ulama Senior, Kerajaan Arab Saudi yang menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris dan tidak mewakili nilai-nilai keislaman. Dewan Ulama Senior menggambarkan bahwa, Ikhwanul Muslimin yang berpusat di Mesir sebagai kelompok yang merusak negara, serta melakukan aksi kekerasan dan teror. Kemudian, Majelis Ulama Senior Arab Saudi menyatakan bahwa, segala bentuk dukungan seperti dana yang diperuntukkan kepada Ikhwanul Muslimin akan dilarang. Hal ini dikarenakan, Ikhwanul Muslimin telah mendorong pemberontakan dalam melawan pemerintah Arab Saudi. *Statement* ini mendorong pemerintah Arab Saudi untuk mengimbau masyarakat Arab Saudi waspada terhadap Ikhwanul Muslimin dan segala bentuk kegiatannya. Pemerintah Arab Saudi memperingatkan untuk tidak bergabung, mendukung, maupun terlibat dalam seluruh kegiatan Ikhwanul Muslimin (MediaIndonesia 2020).

Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS) berbicara tentang Ikhwanul Muslimin, ekstremisme, dan madzhab Islam di Arab Saudi dalam sebuah wawancara dengan *The Atlantic*. Para ekstrimis membajak dan mengubah agama menjadi sesuatu yang baru untuk kepentingan kelompok. Ikhwanul Muslimin mencoba membuat orang memandang Islam dengan caranya. Jadi Ikhwanul Muslimin memiliki kesempatan untuk menyebarkan semua pandangan ekstremis ini, yang mengarah pada pembentukan kelompok teroris paling ekstrem, baik di dunia Sunni maupun Syiah. Orang-orang dalam pendirian agama di sini mengatakan bahwa ekstremisme ini sebagian besar merupakan hasil dari pengaruh Ikhwanul Muslimin pada 1960-an dan 1970-an. Ikhwanul Muslimin (IM) memainkan peran besar dalam menciptakan semua ekstremisme (SaudiNesia 2021).

Dalam penelitian ini, cakupan penelitian telah diperluas hingga ke tahun 2020. Hal ini dikarenakan, pada tahun tersebut terdapat fenomena dimana ada 300 orang lebih yang telah ditangkap karena diduga memiliki hubungan dengan Ikhwanul Muslimin. Hal ini juga selaras dengan keputusan Ulama Kibar: Bayan Haiyah pada tahun 2020. Dimana keputusan tersebut membahas mengenai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya telah dikategorikan sebagai gerakan teroris. Keputusan tersebut juga telah dituangkan dalam Dekrit Kerajaan Arab Saudi pada Mei 2014. Ulama Kibar Arab Saudi telah menyatakan bahwa, Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok teroris yang tidak mewakili nilai-nilai Islam dan memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan secara kelompok/individual (Mustofa 2021).

Dalam mengatasi gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin yang dilabeli oleh Arab Saudi sebagai teroris (BBC News 2014). Arab Saudi berkomitmen untuk mengamankan negaranya dan menolak menjadi tempat yang aman bagi para teroris. Sehingga pemerintah Arab Saudi dalam Perkembangan Kelembagaan dan Hukum bersama Kepresidenan Keamanan Negara menggunakan Undang-Undang (UU) yang dibentuk pada tahun 2017 tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme dan pendanaannya mulai pada tahun 2018. Adapun sebagai penanggung jawabnya adalah *The Presidency of State Security* (PSS) atau Kepresidenan Keamanan Negara dan Direktorat Investigasi Umum Arab Saudi dalam penyelidikan dan membongkar kamp-kamp yang diduga berkaitan dengan teroris (U.S Department of State 2019).

Memakai istilah *counter-terrorism* dari David Cortright dan George Lopez (2007) dengan menggunakan pendekatan *tactical counter-terrorism* yang mana merupakan pendekatan berbasis militer. Sehingga pada pendekatan ini berfokus kepada memburu, menangkap, bahkan membunuh teroris. Termasuk juga menemukan dan menghancurkan kamp-kamp bersarangnya para teroris yang beroperasi (Qurtuby and Aldamer 2021).

Tepatnya pada September 2017, seorang imam terkenal di Arab Saudi dengan pengikut di twitter sebanyak 14 juta yang bernama Salman Al-Odah dan Awad Al-Qarni ditangkap oleh aparat Arab Saudi beserta 20 imam lainnya dan para intelektual karena melakukan pembangkangan, aktivitas spionase, dan memiliki hubungan dengan kelompok teroris yakni Ikhwanul Muslimin. Selanjutnya pada September 2018, Salman Al-Odah dan Awad Al-Qarni bersama para aktivis Arab

Saudi lainnya mengungkapkan pada persidangannya di pengadilan terorisme Riyadh bahwa jaksa menuntut hukuman mati (BBC News 2018).

Oleh karena itu, Kementerian dalam Negeri Saudi Arabia memberitahukan kepada kalangan masyarakat untuk mengadukan setiap tulisan maupun ucapan di *social media* yang berisi gagasan ekstrimis atau teroris. Karena menurut Jaksa Arab Saudi bahwa mencemari reputasi status negara sama saja dengan tindak kejahatan terorisme. (BBC World 2017)

Sejalan dengan pesan dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada 27 November 2017, menyampaikan bahwa tidak ada tempat dan tidak akan membiarkan kelompok teroris melakukan penyimpangan agama dan mengganggu kedamaian negara Arab Saudi. Kemudian menegaskan bahwa pemerintah Arab Saudi akan mengejar terorisme dan memberantas sampai pada akarnya. Bahkan pada rentang tahun 2017-2019 Pasukan keamanan Arab Saudi menangkap lebih dari 300 orang dengan kewarganegaraan asing. Hal tersebut dikarenakan terlibat dalam kegiatan teroris. Tidak hanya di dalam negeri saja, namun Arab Saudi juga andil dalam memberantas kejahatan teroris di negara lain (The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia 2019).

Termasuk juga dalam pendekatan *tactical counter-terrorism*, yakni pada tanggal 8 Juli 2018 terjadi baku tembak dari sebuah mobil saat pemeriksaan kendaraan di Buraidah, Arab Saudi. Sehingga menewaskan satu orang pasukan keamanan Arab Saudi dan satu orang warga negara asing (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

Pada tahun 2019 Arab Saudi mengalami banyak insiden teroris baik mencakup serangan internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah Arab Saudi terus berupaya untuk membangun kerjasama dengan rekan Amerika Serikat sebagai langkah meningkatkan keamanan, kerjasama regional maupun internasional dan langkah untuk melawan aksi teroris yang sedang marak di Arab Saudi. Sehingga memaksa negara Arab Saudi untuk menggunakan pendekatan *tactical counter-terrorism* yakni menggunakan militer atau kekerasan seperti penggunaan IEDs (*Improvised Explosive Devices*), senjata api, dan UAS (Unmanned Aircraft Systems) (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

Pada 7 April 2019, pasukan keamanan Arab Saudi menyerang pos pemeriksaan transportasi di Abu Hadriyah yang mana terdapat para pelaku teroris sehingga membuat keduanya mengalami baku tembak. Dua pelaku berhasil dibekukan oleh pasukan keamanan, namun dua sangka teroris lainnya tewas dalam baku tembak. Selain itu juga, pasukan keamanan dan terdapat juga dua warga sipil non-Arab Saudi mengalami luka-luka (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

Pada 21 April 2019, Gedung Kementerian Dalam Negeri di Kota Al-Zulfi, Provinsi Riyadh terdapat kelompok teroris yang menyelinap masuk untuk usaha melakukan bom bunuh diri. Akan tetapi hal tersebut berhasil digagalkan oleh pasukan keamanan sehingga menimbulkan baku tembak. Hasilnya pasukan keamanan Arab Saudi membunuh empat tersangka teroris tersebut (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

3.2 Upaya Pemerintah Arab Saudi dalam Mengatasi Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin melalui Pendekatan *Strategic Counter-terrorism*

Pendekatan *strategic counter-terrorism* merupakan pendekatan yang bersifat kooperatif non-militer dan mencakup berbagai respons kebijakan. Pendekatan ini juga merupakan elemen yang penting dalam *counter-terrorism* karena untuk melawan terorisme membutuhkan upaya kerjasama dari berbagai pihak baik dari agama, hukum, budaya, pendidikan, dan lain lain. Oleh sebab itu dirancang pendekatan ini yang bertujuan untuk menghilangkan kondisi yang mendasar terkait ideologi radikal dan terorisme (Qurtuby and Aldamer 2021). Di antara ragam kebijakan yang diambil negara Arab Saudi dalam mengkonter Ikhwanul Muslimin adalah:

3.2.1 Perang Pemikiran

Pada bulan 21 Mei 2017 Arab Saudi juga melakukan kampanye dalam berbagai macam untuk mengatasi ideologi ekstremis atau teroris sampai pada akarnya melalui pendekatan *strategic counter-terrorism*. Negara Arab Saudi meresmikan *Global Center for Combating Extremist Ideology* (Etidal) yang mana pusat kantornya terletak di Kota Riyadh. Etidal ini dibangun sebagai bentuk upaya *counter-terrorism* yang berfokus pada media dan budaya moderasi, toleransi serta melakukan pencegahan propaganda. Selain itu, Etidal juga telah meningkatkan tekhnologinya dalam bentuk teknik inovatif yang dapat memantau dan juga menganalisis berbagai artikel dengan akurasi tinggi (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

Dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Arab Saudi mengganti dan merevisi buku yang mengajarkan intoleransi dan ekstremisme. Pada September 2018, negara Arab Saudi melakukan inivestigasi besar terhadap beberapa universitas yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok teroris Ikhwanul Muslimin. Sehingga banyak karyawan dan dosen pengajar yang diberhentikan karena dianggap mengkhawatirkan pemerintah Arab Saudi. Lebih dari itu, Arab Saudi juga memperbaharui kurikulum pendidikannya dan menggantikan para pengajarnya. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena untuk memberantas jejak pengaruh kelompok Ikhwanul Muslimin dan Arab Saudi menegaskan kembali bahwa akan memecat siapapun yang memiliki keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin (Haaretz 2018).

Adapun tujuan dilakukan investigasi tersebut yakni sejalan dengan misi dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahwa menginginkan bentuk Islam yang lebih moderat. Oleh karena itu perlunya modernisasi secara mendalam terkait bentuk Islam yang terkesan konservatif. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan telah membersihkan kurikulum dan merevisi berbagai literatur untuk memastikan bahwasannya tidak terkandung hal-hal berkaitan dengan ekstrimisme atau bahkan terorisme (The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia 2019).

3.2.2 Pencegahan Pendanaan Teror

Arab Saudi sebagai negara kaya di kawasan Asia Barat dan juga merupakan negara dengan salah satu sistem kontrol keuangan yang ketat. Hal tersebut dilakukan Arab Saudi untuk meminimalisir terjadinya pendanaan kepada teroris.

Pada Mei 2017, sebagai bentuk memerangi pendanaan teroris Arab Saudi dan Amerika Serikat bekerjasama untuk mendirikan *Terrorist Financial Targeting Center* (TFTC). Dilansir dari *U.S Embassy & Consulate in Saudi Arabia* (2017), Menteri Keuangan Arab Saudi yang bernama Steven T. Munchin mengatakan bahwa dengan adanya TFTC ini akan secara tegas mengatasi ancaman teroris dan mengatur sistem kontrol keuangan.

Adapun komitmen dari kerajaan Arab Saudi dalam memperkuat kemampuan mengontrol keuangan. Maka, Kejaksaan Umum Arab Saudi mengeluarkan pedoman pada tahun 2017 yang membahas terkait pencegahan pencucian uang dan langkah-langkah apabila terungkap kasus pencucian uang.

Dalam urusan luar negeri, negara Arab Saudi bergabung dalam beberapa organisasi yang menangani terkait pendanaan *counter-terrorism*. Organissasi-organisasi ini meliputi kelompok G-20, *International Organization of Securities Commisions* (IOSCO), *Financial Stability Board* (FSB) dan *Internastional Association of Insurance Supervisors* (IAIS). Selain itu, Arab Saudi juga aktif membantu Afrika Barat untuk melawan teroris. Pada Desember 2017, Menteri Negara Arab Saudi untuk urusan Afrika bernama Ahmed bin Abdul Aziz Katten memberikan dana sebesar $113,7 juta kepada pasukan G-5 Sahel yang terdiri dari Mali, Niger, Burkina Faso, dan Chad (Arab News 2018).

Kemudian pada Juni 2019, negara Arab Saudi bergabung dalam *Financial Action Task Force* (FATF) dengan keanggotaan penuh. Adapun tujuan FATF ini adalah menetapkan kriteria dan pelaksanaan yang efektif terkait langkah-langkah operasional untuk memberantas pendanaan teroris, pencucian uang dan berbagai ancaman lainnya yang berkaitan dengan integritas sistem keuangan internasional.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya negara Arab Saudi ini secara tegas ingin memberantas berbagai macam bentuk tindak terorisme, bahkan Arab Saudi juga meninjau perputaran uang dengan sistem yang ketat. Karena dikhawatirkan dana yang keluar justru disalahgunakan dan dijadikan untuk alat teroris.

3.2.3 Kerjasama Internasional

Pada 5 Juni 2017, negara Arab Saudi bekerja sama dengan negara teluk lainnya untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar, termasuk perdagangan. Hal tersebut bermula karena negara Qatar diduga mendukung kelompok terorisme, dan juga negara Qatar ingin meningkatkan hubungannya dengan Iran. Namun, Qatar mengklarifikasi bahwa penyebab utama blokade negara teluk tersebut karena serangan siber yang dilakukan oleh kantor berita nasional akan tetapi mengatasnamakan penguasa Qatar. Jika dianalisis lebih dalam, persoalan tersebut menurut Ali Shihabi sebagai pendiri *Arab Foundation* di Washington dilansir dari BBC (2018) bahwa akar permasalahan antara kedua negara sudah sejak 20 tahun yang lalu, namun baru memuncak pada tahun 2017 (Knell 2018).

Pada 15 November 2018, Etidal yang berpusat di Riyadh kedatangan delegasi dari Kuwait untuk rencana pembangunan dan kerjasama internasioanal yang dipimpin oleh Duta Besar Nasser Al-Sabeeh bersama Asisten Menteri Luar Negeri Kuwait. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Kuwait apresiasi hasil yang dicapai oleh Etidal yang mana dengan kemampuannya dapat menganalisis dan mendeteksi ekstremisme dalam berbagai bahasa. Sehingga, dengan membangun kemitraan regional dan internasional menggunakan Etidal ini

dapat mencapai tujuan bersama yakni menghilangkan ekstremisme dan terorisme dengan menanamkan nilai-nilai koeksistensi dan toleransi. (Etidal 2018)

Termasuk juga dalam pendekatan *strategic counter-terrorism* yakni Kerjasama regional maupun internasional. Pada tahun 2019 dalam diplomatik regional negara Arab Saudi mengalami peningkatan yang kuat terhadap penanganan *counter-terrorism*. Hal tersebut dikarenakan negara Arab Saudi membangun mitra dan kerjasama secara regional dan bilateral. Sedangkan, dalam lingkup internasional negara Arab Saudi berusaha untuk memperkokoh pertahanan dan kolaborasi operasional dengan berbagai negara serta organisasi internasional melalui *UN Counter-Terrorism Center, The GCTF (Global Counter-Terrorisme Forum,* dan negara Teluk (U.S Department of State 2019).

Keseluruhan tindakan di atas menunjukan bahwa negara Arab Saudi melakukan pendekatan *strategic counter-terrorism* secara lebih dominan. Dilihat dari ragam kebijakan yang multidimensi, multisektor dan juga melibatkan kerjasama internasional.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dinamika Arab Saudi – Ikhwanul Muslimin mengalami naik turun. Pada fase pertama, masa King Abdul Aziz kelompok Ikhwanul Muslimin diberikan perlindungan karena mengalami resesi di negara teluk. Kemudian pada fase kedua, King As-Syahid Malik Faishal. Hubungan Ikhwanul muslimin makin dekat. Sehingga banyak tokoh Ikhwanul Muslimin yang diberikan posisi untuk berkontribusi kepada negara Arab saudi. Namun hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul renggang ketika negara Arab Saudi dikritik karena telah meminta bantuan kepada Amerika Serikat duntuk melawan Saddam Hussein. Selanjutnya, hubungan pun makin memburuk ketika terjadi Arab Spring yang mana mengakibatkan gangguan politik serta pemberontakan ditandai dengan runtuhnya pemerintahan diktator di Mesir, Libya, Mesir, dan Tunisia. Sehingga pada saat itu kelompok Ikhwanul Muslimin dimasukkan ke dalam daftar teroris (Grabowski 2016).

Dalam skripsi ini yang berjudul "Kebijakan Arab Saudi terhadap Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin 2017-2020 ditinjau dari Perspektif *Counter-Terrorism*" membawa penulis untuk melihat lebih jauh bagaimana kebijakan Arab Saudi terhadap gerakan transnasional Ikhwanul Muslimin tahun 2017-2020 melalui perspektif *counter-terrorism* menurut David Cortright dan George Lopez (2007). Menurut Cortrigh dan Lopez, pendekatan utama *counter-terrorism* terbagi menjadi dua: *tactical* dan *strategic*. *Tactical counter-terrorism* merujuk kepada pendekatan berbasis militer. sementara *strategic counter-terrorism* mencakup berbagai respon kebijakan kerjasama dan bersifat non-militer.

Dalam hal ini, upaya Arab Saudi secara *tactical counter-terrorism* adalah mengejar terorisme meliputi penangkapan, upaya penyerangan dan strategi-strategi militer lainnya terhadap aktor-aktor IM di Arab Saudi, salah satunya penangkapan dan penjatuhan hukuman mati terhadap imam Salman Al-Odah dan Awad Al-Qarni, yang diduga terlibat dengan Ikhwanul Muslim. Sedangkan secara *strategic counter-terrorism* yakni: 1) Perang pemikiran, meliputi kebijakan Arab Saudi untuk membersihkan kurikulum serta pengajar yang memiliki kaitan dengan kelompok teroris khususnya Ikhwanul Muslimin; 2) Pencegahan Pendanaan Teror, Arab Saudi membuat sistem kontrol keuangan ketat guna meminimalisir pendanaan kepada Ikhwanul Muslimin; serta 3) Kerjasama Internasional, untuk meningkatkan penanganan *counter-terrorism* dengan membangun kerjasama regional bahkan internasional. Penulis menjumpai bahwa pendekatan *strategic counter-terrorism* Arab Saudi lebih dominan dibandingkan *tactical counter-terrorism*.

4.2 Rekomendasi

Dalam penelitian ini, penulis fokus kepada "Kebijakan Arab Saudi terhadap Ikhwanul Muslimin tahun 2017-2020 melalui Perspektif *Counter-Terrorism*". Jika melihat sejauh ini, tak dapat dipungkiri bahwasannya selalu ada dinamika perkembangan dalam hubungan pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, penulis berharap untuk penelitian selanjutnya membahas lebih luas lagi dan membahas yang terjadi pada tahun-tahun terakhir.

Daftar Pustaka

Aksa. 2017. "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah, dan Pengaruhnya di Indonesia." *Historical Studies Journal* (2541-6960): 2-3.

Alkarama. 2017. *قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله 2017*. 02 November. https://www.alkarama.org/ar/documents/qanwn-mkafht-jraym-alarhab-wtmwylh-2017.

Andrianto, Robertus. 2022. *10 Negara Penghasil Minyak Bumi Terbesar, Ada Indonesia?* 06 September. https://www.cnbcindonesia.com/market/20220906162442-17-369783/10-negara-penghasil-minyak-bumi-terbesar-ada-indonesia.

Andriyanto, Heru. 2019. *Sejarah Ikhwanul Muslimin HIngga Disebut Kelompok Teroris.* Berita Saty.

Arab News. 2018. *Saudi Arabia pledges $113m to support Sahel countries.* 7 Desember. https://www.arabnews.com/node/1417346/saudi-arabia#:~:text=The%20G5%20Sahel%20comprises%20Mali%2C%20Mauritania%2C%20Niger%2C%20Burkina,donation%20of%20%24113.7%20million%20to%20support%20Sahel%20countries.

Asharq Al-Awsat. 2017. *Saudi Shura Council Approves Draft Law to Combat Terrorism, Terror Funding.* 17 Oktober. https://english.aawsat.com/home/article/1055121/saudi-shura-council-approves-draft-law-combat-terrorism-terror-funding.

Ayasrah, A. 2009. *Jordan Stands at The Fronts Line of Combatting Terrorism.* Pennsylvania: U.S Army War College.

Aziz, Abdul. 2019. "Gerakan Transnasional Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Palestina." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 110-112.

BBC. 2014. *Arab Saudi tetapkan Ikhwanul Muslimin kelompok terori.* Jakarta: BBC News Indonesia.

—. 2017. *Empat negara Arab putuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.* 9 Juni. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-40155610.

BBC News. 2014. *Arab Saudi tetapkan Ikhwanul Muslimin kelompok teroris.* 7 Maret. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140307_arab_saudi_ikhwanul.

—. 2018. *Saudi Arabia to punish online satire 'mocking public order'.* 4 September. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-45410676.

BBC World. 2017. *Arab Saudi Tangkap Imam-imam yang Dianggap Membangkang.* 14 September. https://news.detik.com/bbc-world/d-3643354/arab-saudi-tangkap-imam-imam-yang-dianggap-membangkang.

Blanchard, M C, and E C Humud. 2018. "The Islamic State and U.S. Policy." *Congressional Research Service.*

Colombo, Matteo. 2022. "Lost in transition: The Muslim Brotherhood in 2022." *Clingendael Netherland Insitute of Internastional Relations.*

Cortright, David, and George A. Lopez. 2007. *Uniting Against Terror: Cooperative Nonmilitary Responses to the Global Terrorist Threat.* London, England: The MIT Press.

Dacreama, E. 2013. "New Emerging balaces in the post-Arab Spring: the Muslim Brotherhood and the Gulf Monarchies." *ISPI - Analysis.*

DetikNews. 2021. *Arab Saudi Eksekusi Mati 81 Terpidana Teroris dalam Sehari.* Jakarta: DetikNews.

Doghere, Fahad Al. 2008. *The Long War Agains Terrorism in Saudi Arabia.* Virginia: Marine Corps Combat Command Development Command.

el-Fadl, K A. 2006. *Selamatkan Islam dari Muslim Puritan.* Edited by M Mushthafa. Translated by H Mustofa. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Etidal. 2018. *مساعد وزير الخارجية الكويتي : "اعتدال" قادر على إضعاف تأثير التنظيمات المتطرّفة* 15 November. https://etidal.org/%d9%85%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%af%d8%a7%d9%84-%d9%82/.

European Eye on Radicalization. 2022. *Reformasi dan Reaksi (Islamis) di Arab Saudi: Wawancara dengan Khaled al-Addad.* 21 Oktober. https://eeradicalization.com/reform-and-islamist-reaction-in-saudi-arabia-an-interview-with-khaled-al-addad/.

Galeeva, Diana. 2018. *The Gulf Cooperation Council (GCC): A Comprehensive View.* 9 April. https://mesbar.org/the-gulf-cooperation-council-gcc-a-comprehensive-view/.

Gause II, F. Gregorius. 2021. "Saudi Arabia and The War on Terrorism." *Hoover Press: Garfinkle/Terrorism* 89-102.

Gause, F. Gregory. 2013. *Saudi Arabia and the War on Terrorism.* Washington: Garfinkle/Terrorism.

Grabowski, Wojciech. 2016. “The Muslim Brotherhood and the Crisis in the GCC: Roots, Issues and Implications.” *Stosunki Międzynarodowe – International Relations* 356-358.

Haaretz. 2018. *Saudi Arabia Purges Muslim Brotherhood Influence From Schools.* 21 Maret. https://www.haaretz.com/middle-east-news/2018-03-21/ty-article/saudi-arabia-purges-muslim-brotherhood-influence-from-schools/0000017f-dbce-db5a-a57f-dbee1a550000.

Hardoko, E. 2018. *Arab Saudi Bersihkan Kurikulum Sekolah dari Pengaruh Ikhwanul Muslimin.* 21 Maret. https://internasional.kompas.com/read/2018/03/21/20574681/arab-saudi-bersihkan-kurikulum-sekolah-dari-pengaruh-ikhwanul-muslimin.

Haryadi, Panji. 2018. “Peran Muhammad bin Salman terhadap Perubahan Pilar Kenegaraan .” *Jurnal ICMES Press* 3-4.

Hasan, N. 2008. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru.* Jakarta: Pustaka LP3ES + KITLV Jakarta.

Hettne, Bjorn. 2000. “The Regionalism: A Prologue.” Edited by et al Bjorn Hettne. *The New Regionalism and The Future of Security and Development* (Macmillan Press Ltd) xviii-xix.

Holsti, Kalevi Jaako. 1974. *A Frame Work for Analysis.* London: Prentice Hall International Inc.

Izaqi, M S. 2016. “Pengaruh Kelompok Wahabi terhadap Politik Luar Negeri Arab Saudi dalam Arab Spring di Mesir tahun 2011-2013.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 3-5.

Kepel, G. 2002. *Jihad: The Trail of Political Islam.* Perancis: Belknap Press.

Knell, Yolande. 2018. *Setahun diboikot oleh negara-negara Teluk, Qatar 'tidak juga tumbang'.* 5 Juni. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44372341.

Lacroix, Stephane. 2014. *Saudi Arabia's Muslim Brotherhood predicament.* 20 March. https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/03/20/saudi-arabias-muslim-brotherhood-predicament/.

Lum, Chynthia. 2006. "Are counter-terrorism strategies effective? The results of the Campbell systematic review on counter-terrorism evaluation research." *Journal of Experimental Criminology* 481.

Makalew, Alfandrio Christian Putra. 2019. "Kedudukan Pre-emptive Strike (Serangan Pendahuluan) dalam Hukum Internasional." *Lex Et Societatis.*

Mamdud, R. 2018. "Genealogi Gerakan Ikhwan Al Muslimin dan Al Qaeda di Timur Tengah." *Jurnal ICMES* 49-51.

Mashino, Ito. 2021. "The Bipolar Conflict in The Middle East Over The Muslim Brotherhood." *EMEA & Russia Dept., Global Economic & Political Studies Div. Mitsui & Co. Global Strategic Studies Institute.*

McCarthy, Niall. 2015. *Saudi Arabia Has Become The World's Biggest Arms Importer.* 11 March. https://www.statista.com/chart/3295/saudi-arabia-has-become-the-worlds-biggest-arms-importer/.

MediaIndonesia. 2020. *Dewan Ulama Saudi Tetapkan Ikhwanul Muslimin Teroris dan Sesat.* Jakarta: Media Indonesia.

Moleong, L J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mushlih, Amri, and Hurriyah Hurriyah. 2016. "Political Actors and the Failure of Egypt's Democratic Transition 2011-2013." *Political Journal.*

Muslikhasti, Siti. 2012. “Isu Terorisme dalam Jurusan Hubungan Internasional Perspektif Islam.” *Jurnal Hubungan Internasional.*

Mustofa, Ahmad Zainal. 2021. “ANALISIS KERJASAMA INDONESIA-ARAB SAUDI DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME .” *Jurnal PIR Vol. 5 No. 2* 175-190.

Naheem, Mohammed Ahmad. 2019. “Saudi Arabia’s efforts on combating money laundering and terrorist financing: (Review undertaken in September 2017).” *Journal of Money Laundering Control* 6.

Njong, Taufik Yusuf. 2021. *Pasang Surut Hubungan Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin.* Edited by Ibnu Kharis. HarakahBooks.

Pradana, Faizal Amjad Adi Pratama. 2019. “Strategi Arab Saudi dalam Penanggulangan Terorisme.” In *Tidak Diterbitkan*, by Skripsi. Jember: Universitas Jember.

Qurtuby, Sumanto Al, and Shafi Aldamer. 2021. “Terrorism and Counterterrorism in Arab Saudi.” *Department of Global & Social Studies, King Fahd University of Petroleum & Minerals, Dhahran, Kingdom of Arab Saudi.*

Ramly, Linda Nur, and RR. Terry Irenewaty. 2015. “Kebijakan Politik Muhammad Mursi SebagaiPresiden Mesir(2012-2013).” *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 92-99.

Riaz, A. 2018. “Counter-terrorism Strategy: An Alternative Proposal.” *The Daily Star.* 1 July. https://www.thedailystar.net/opinion/black-white-grey/counter-terrorism-strategy-alternative-proposal-1597762A.

Sandler, Todd. 2005. “Collective versus unilateral responses to terrorism.” *JSTOR.* Maret. http://www.esi2.us.es/~mbilbao/pdffiles/sandler.pdf.

Saputra, Eka Yudha. 2017. *Arab Saudi Disebut Akan Eksekusi Mati Tiga Ulama Setelah Ramadan.* Jakarta: Tempo.

SaudiNesia. 2021. *MBS: Ikhwanul Muslimin Berperan Besar Dalam Menciptakan Ekstremisme.* SaudiNesia.

Selim, Gamal M. 2015. "Brotherhood Egypt under SCAF and The Muslim." *Pluto Journals* 195.

Sidiq Ahmadi, Muhammad Adel Aditya. 2021. "Relasi Qatar dengan Ikhwanul Muslimin dalam Kerangka Nested Power." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* IV.

The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia. 2019. *Arab Saudi Mencapai Keanggotaan Penuh dalam Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF).* 28 Juni . https://www.saudiembassy.net/fact-sheets/saudi-arabia-achieves-full-membership-financial-action-task-force-fatf.

The Embassy of The Kingdom of Saudi Arabia. 2019. "Saudi Arabia and Counterterrorism." Saudi Arabia. file:///C:/Users/HP/OneDrive/Documents/Kuliah%20Semester%206/Skripsi%20Bismillah/Refrences/SAUDI%20ARABIA%20AND%20COUNTERTERRORISM.pdf.

U.S Department of State. 2019. *Country Reports on Terrorism 2019: Saudi Arabia.* https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/saudi-arabia/.

U.S Embassy & Consulates in Saudi Arabia. 2017. *U.S. and Saudi Arabia to Co-Chair New Terrorist Financing Targeting Center.* 21 May.

https://sa.usembassy.gov/u-s-saudi-arabia-co-chair-new-terrorist-financing-targeting-center/.

Usman. 2014. “Model Deradikalisasi Narapidana Terorisme Studi Perbandingan Deradikalisasi di Yaman, Arab Saudi, Singapore, Mesir, dan Indonesia.” *Inovatif, Volume VII Nomor II* 1-16.

Wafi, M H. 2018. “Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi.” *Islamic World Politics* 2.